

## **Optimalisasi Peran Korem 151/Binaiya Dalam Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar**

**Hamanja Hasan <sup>1)</sup>, Tri Partono <sup>2)</sup>, Berlian Putra Kusuma <sup>3)</sup>, Waluyo Zulfikar <sup>4)</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat

Author's Correspondence : [1hamanjahasan0407@gmail.com](mailto:1hamanjahasan0407@gmail.com), [2tripartono64tsu@gmail.com](mailto:2tripartono64tsu@gmail.com),  
[3utami08.pk@gmail.com](mailto:3utami08.pk@gmail.com), [4izoel007@gmail.com](mailto:4izoel007@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Small outer islands hold a strategic role in national defense. The 151st Military Resort Command/Binaiya is responsible for securing these small outer islands in Eastern Indonesia. This study aims to analyze the challenges faced by the 151st Military Resort Command/Binaiya in carrying out the security operations for the small outer islands within its area of responsibility. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include literature review and secondary data sources. The data analysis technique in this research follows three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of this study reveal that the challenges faced by the security task force under the command of the 151st Military Resort Command/Binaiya include threats of international crime, unintegrated policies and systems, and low community participation. On the operational side, the challenges include the lack of selection systems and competency standards, the absence of pre-deployment programs, inadequate security post facilities, and unstructured and uncoordinated guard systems. Optimization strategies are carried out through external approaches focused on policy changes and integration strategies, as well as internal approaches focused on improving governance, infrastructure development, capacity building of personnel resources, and the establishment of an adequate operational system.

**Keywords:** Military, Military Operations, Defense, Outer Islands

### **ABSTRAK**

Pulau kecil dan terluar memiliki peran strategis dalam pertahanan nasional. Komando Resor Militer 151/Binaiya memegang komando dalam pengamanan pulau kecil terluar di kawasan timur Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Komando Resor Militer 151/Binaiya dalam melaksanakan pengamanan pulau kecil terluar wilayah kerjanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan sumber data sekunder. teknik analisis data pada penelitian menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh satuan tugas pengamanan pulau terluar dibawah komando Korem 151/Binaiya diantaranya ancaman kejahatan internasional. Kebijakan dan sistem yang belum terintegrasi dan rendahnya partisipasi masyarakat. pada sisi teknis operasional kendala yang dihadapi meliputi sistem seleksi dan standar kompetensi yang belum tersedia, belum adanya program pra-penugasan, fasilitas pos pengamanan yang belum memadai, sistem penjagaan yang belum terstruktur dan terkoordinasi. Strategi optimalisasi dilakukan dengan pendekatan eksternal yang berfokus pada perubahan aspek kebijakan dan strategi integrasi serta pendekatan internal yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pembenahan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya personil dan sistem operasi yang memadai.

**Kata Kunci:** Militer, Operasi Militer, Pertahanan, Pulau Terluar

### *Article History:*

*Received; 22-08-2024; Revised; 27-08-2024; Accepted; 11-09-2024*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (Kementerian Luar Negeri RI, 2018). Keberadaan pulau-pulau tersebut, sebagian besar merupakan pulau - pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia, pulau-pulau kecil terluar ini merupakan batas fisik negara yang bersinggungan langsung dengan negara lain. Oleh karena itu, pulau kecil terluar memiliki peran yang sangat penting bagi kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia (Agoes., 2011; Ningsih et al., 2023). Tidak hanya menentukan batas teritorial, tetapi juga menjadi garis depan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, pulau kecil terluar berperan dalam menentukan batas wilayah Indonesia dan menjamin integritas teritorial dari ancaman luar. Adapun legislasi lain yang mengatur pulau - pulau terluar ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau - Pulau Kecil Terluar, Keppres ini mengatur mengenai penetapan 111 Pulau - Pulau Kecil Terluar di Indonesia, yang terdiri dari 42 pulau berpenduduk dan 69 pulau tidak berpenduduk dengan lokasi yang tersebar di seluruh wilayah NKRI.

Keberadaan pulau - pulau kecil terluar banyak yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional (Dabova, 2013; Marjavaara, 2007). Praktik - praktik ilegal seperti penyelundupan barang dan manusia, penangkapan ikan ilegal, dan eksploitasi ilegal sumber daya alam yang ada di pulau - pulau terluar tersebut sering sekali ditemukan. Selama Mei 2023 sampai Januari 2024, *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) mendeteksi 3 ancaman keamanan maritim di wilayah Indonesia, diantaranya penelitian ilmiah oleh kapal asing (terjadi di laut Natuna Utara, dilakukan oleh kapal Cina, melanggar hukum UNCLOS), Pencemaran laut berupa tumpahan minyak (diduga aktivitas kapal di sekitar Selat Malaka, Selat Singapura, dan perairan sebelah timur Johor) dan penangkapan ikan ilegal (sejak tahun 2021, terjadi di laut Natuna Utara, Pelaku KIA Vietnam dan Cina) (Maulana, 2024). Indonesia merupakan salah satu negara dengan penangkapan ikan ilegal yang cukup besar. Jumlah kejahatan *Illegal, unreported and unregulated* (IUU) di luar negeri meliputi 48,48% Kasus Ketenagakerjaan, 35,18% Penyelundupan Manusia, 12,12% Perdagangan Manusia, 3,97% Penangkapan Ikan secara Ilegal, dan 0,25% Narkoba dan Obat-obatan Terlarang (Grahadyarini, 2021).

Selain aspek keamanan, pulau kecil terluar memiliki peran strategis dalam konteks geopolitik dan ekonomi (Avanesyan, 2023). Secara geopolitik, pulau-pulau ini merupakan bagian integral dari strategi pertahanan maritim Indonesia yang mencakup pemantauan dan pengamanan wilayah perbatasan. Kehadiran militer, khususnya TNI Angkatan Darat (AD), di pulau-pulau ini menjadi vital untuk menegakkan kedaulatan dan mencegah pelanggaran batas teritorial. Dari perspektif ekonomi, pulau kecil terluar menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, termasuk perikanan dan pariwisata, yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mendukung perekonomian nasional. Optimalisasi potensi ekonomi ini memerlukan upaya pengelolaan yang berkelanjutan dan strategi pengembangan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Secara keseluruhan, pulau kecil terluar memiliki multifungsi yang esensial bagi Indonesia. Dengan demikian, pengamanan dan pengelolaan yang efektif dari pulau-pulau ini merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk memastikan kedaulatan, keamanan, dan kemakmuran Indonesia di masa depan.



Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, militer, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menjawab tantangan dan memaksimalkan potensi yang ada.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia, terutama di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Sebagai bagian dari angkatan bersenjata, TNI AD memiliki tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mencakup pertahanan negara, menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah, serta melindungi bangsa dari segala bentuk ancaman. Salah satu fungsi utama TNI AD adalah melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP), yang mencakup tugas-tugas kemanusiaan, pengamanan wilayah perbatasan, dan bantuan dalam penanganan bencana, serta memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Disamping itu, TNI AD juga bertugas untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional, baik dari ancaman tradisional seperti invasi militer, maupun ancaman non-tradisional seperti terorisme dan separatisme.

TNI AD memiliki pengalaman dan kapasitas yang signifikan dalam pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil di Indonesia. Dalam pengamanan wilayah perbatasan, TNI AD mengerahkan satuan-satuan tugas khusus yang ditempatkan di berbagai titik strategis sepanjang perbatasan darat dan maritim. TNI AD juga melakukan patroli rutin dan pengawasan intensif terhadap aktivitas di sekitar wilayah perbatasan untuk mencegah penyelundupan, perdagangan manusia, dan aktivitas ilegal lainnya. Pengalaman TNI AD dalam operasi militer selain perang, seperti penanganan bencana alam dan kegiatan kemanusiaan, juga menunjukkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan dan pemeliharaan stabilitas di pulau-pulau terpencil. Selain itu, TNI AD turut berperan dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil, yang menjadi bagian dari strategi keseluruhan untuk memperkuat keamanan dan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil. Namun, upaya pengamanan ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis (Agoes., 2011; Ningsih et al., 2023). Banyak pulau kecil terluar yang memiliki infrastruktur yang minim dan sulit diakses, sehingga menyulitkan penempatan dan dukungan logistik bagi pasukan TNI AD yang bertugas di sana (Antara, 2021; Stratsea, 2024). Selain itu, keterbatasan anggaran pertahanan juga menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas dan kehadiran militer di daerah-daerah pulau-pulau kecil terluar (Devence Review Asia, 2023; Greenless, 2022).

Pada umumnya penelitian tentang pengamanan pulau-pulau kecil terluar banyak dilihat dari perspektif operasi militer. Perspektif tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik masih jarang digunakan, beberapa penelitian tentang pengamanan pulau-pulau kecil terluar yaitu dengan pengembangan pangkalan militer di pulau-pulau terpencil Indonesia berfungsi sebagai strategi penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan perlindungan kedaulatan (Naibaho, 2022) Penyelesaian penetapan batas maritim akan menetapkan kedaulatan Indonesia, memastikan keamanan dan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut (Agoes., 2011) dan lemahnya tata kelola dan keamanan serta penegakan hukum maritim di daerah pulau-pulau kecil dan terluar (Manuputty et al., 2015). Adapun penelitian lain dengan perspektif pemerintahan membahas tentang pengamanan pulau kecil terluar dengan



melibatkan pemberdayaan masyarakat (Ningsih et al., 2023), Strategi pertahanan laut Indonesia untuk mengamankan pulau-pulau terpencil dengan mengatasi ancaman seperti kekuatan asing yang mengeksploitasi perairannya, instrumen hukum yang tidak lengkap, terorisme, pembajakan, dan penangkapan ikan ilegal (Case et al., 2022). Penelitian ini mengambil perspektif dari peran satuan teritorial dalam pengamanan pulau-pulau kecil terluar.

Komando Resort Militer (Korem) 151/Binaiya merupakan Sub Kompartemen Strategis dari Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Patimura, yang bertugas pokok salah satunya di bidang Operasi Militer Selain Perang yang memiliki wilayah tanggung jawabnya kawasan diantaranya Pulau Lirang, Pulau Wetar, Pulau Letti, Pulau Metimarang, Pulau Masella, Pulau Selaru, Pulau Larat, Pulau Batu Goyang dan Pulau Kisar berbatasan langsung dengan RDTL (Republik Demokratik Timor Leste. Pulau-pulau kecil dan terluar yang berada di wilayah kerja Korem Binaiya memiliki posisi strategis dalam konteks keamanan negara dan rawan terhadap ancaman-ancaman non militer seperti penyelundupan dan *illegal fishing*. Ancaman pada pulau-pulau kecil terluar tidak hanya pada aspek militer lebih dari itu juga menghadapi tantangan non-militer. Secara ideal, Korem 151/Binaiya sebagai Satkowil TNI AD dapat menggunakan kekuatan militernya untuk melaksanakan operasi secara teritorial mencakup pulau-pulau terluar secara efektif dan efisien. Mengingat pulau-pulau terluar tersebut merupakan daerah perbatasan terpencil dan rawan konflik, sehingga tidak cukup hanya dengan memberdayakan satuan tugas pengamanan pulau terluar (Satags Pamputer), tetapi juga memerlukan peran teritorial serta gelar kekuatan yang sesuai dengan bentuk dan kompleksitas ancaman dan tipologi wilayah Korem 151/Binaiya.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori strategi pertahanan sebagai landasan analisis. Menurut Yarger, (2006) strategi pertahanan merupakan taktik besar yang dijalankan institusi militer dalam menggerakkan suatu pasukan dalam ruang dan waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Strategi pada konteks pertahanan negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar yaitu proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Acuan teori selanjutnya yaitu teori *Non-Traditional Security* yaitu teori keamanan yang meliputi aktivitas non militer. *Non-Traditional security* merupakan strategi keamanan yang memfokuskan pada upaya untuk menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Pendekatan keamanan non tradisional lebih menekankan pada aspek perlindungan manusia sebagai individu dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (Darmono, 2010). Berdasarkan karakteristik dari keamanan non-tradisional, telah mempengaruhi paradigma dan strategi militer. Pada doktrin dan strategi militer di berbagai negara telah berkembang strategi yang berkaitan dengan operasi militer dan operasi non-militer yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman dan lingkungan strategis. Salah satu implikasi dari perkembangan konsep non-traditional security adalah munculnya konsep *Military Operations Other Than War (MOOTW)* sebagai strategi untuk operasi ancaman non-traditional security atau yang dikenal dengan istilah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Lin, 2018). Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran dilakukan oleh Korem 151/Binaiya pengamanan pulau kecil dan terluar di wilayah kerjanya.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Korem 151/Binaiya dalam melaksanakan tugas pengamanan pulau-pulau kecil terluar di wilayah kerjanya. Berdasarkan permasalahan dan urgensi penelitian, rumusan masalah penelitian ini diantaranya membahas tentang bagaimana optimalisasi peran Korem 151/Binaiya dalam pengamanan pulau kecil dan terluar serta menganalisis tantangan dan hambatan dalam pengamanan pulau kecil dan terluar di wilayah kerja Korem 151/Binaiya. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang upaya pengamanan pulau kecil terluar di Indonesia serta memberikan rekomendasi operasional dalam meningkatkan optimalisasi peran TNI Angkatan Darat pada pengamanan pulau kecil terluar yang berkontribusi pada peningkatan sistem pertahanan negara

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena relevan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan fenomena tentang optimalisasi peran komando resort militer 151/Binaiya dalam pengamanan pulau kecil dan terluar di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari literatur, arsip media massa maupun dokumen-dokumen (Moleong, 2017). Teknik pengolahan data dilakukan dengan melakukan kategorisasi data berdasarkan pertanyaan penelitian serta memeriksa reliabilitas dengan triangulasi data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) (B. Miles & Huberman, 1994). Penelitian ini menggunakan pembagian analisis berdasarkan domain pertanyaan penelitian yaitu analisis untuk memperoleh gambaran umum penelitian, analisis taksonomi berdasarkan kategorisasi permasalahan penelitian, analisis komponen dari teori yang digunakan serta analisis dengan menggabungkan seluruh dimensi untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2013).

## **DISKUSI**

### **1. Kebijakan Pengamanan Pengamanan Pulau Kecil Terluar**

Pertahanan negara merupakan segala usaha dalam mempertahankan kedaulatan negara yang diselenggarakan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan untuk melindungi segenap tumpah darah, menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas pokok bidang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) salah satunya yaitu pengamanan wilayah perbatasan. Wilayah pulau terluar Indonesia memiliki tiga fungsi penting diantaranya sebagai fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi pertahanan (Sasmini, 2009). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa dalam pembangunan wilayah pertahanan salah satunya yaitu pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT). Adapun beberapa strategi pembangunan wilayah perbatasan dan pulau kecil diantaranya 1).



mengoptimalkan integrasi peran dan fungsi antar instansi pusat dan daerah dalam mengelola perbatasan; 2). memperkuat kehadiran TNI dan mengoptimalkan fungsi teritorial di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan, termasuk peningkatan gelar kekuatan TNI yang bersifat strategis; 3). meningkatkan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu; 4). mewujudkan pembangunan pangkalan-pangkalan militer baru yang dilengkapi dengan fasilitas guna meningkatkan kesejahteraan prajurit serta meningkatkan optimalisasi operasi; dan 5). mengoptimalkan upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dalam penyelesaian masalah perbatasan secara damai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar pasal 5 menyatakan bahwa pemanfaatan pulau kecil terluar dapat dilakukan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pulau kecil terluar diposisikan sebagai garda terdepan pertahanan nasional (Nugraha, 2023). Berdasarkan Doktrin Pertahanan Nasional pengamanan wilayah perbatasan diselenggarakan melalui pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan darat, laut dan udara sedangkan pengamanan wilayah pulau kecil terluar dilakukan dengan penggelaran kekuatan TNI. Pengamanan wilayah pulau kecil terluar pada prinsipnya dilakukan oleh ketiga matra TNI dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing matra. Sebagian besar pulau-pulau terluar merupakan bagian dari perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga. Pengamanan kawasan pulau-pulau kecil terluar dipercayakan kepada satuan marinir TNI Angkatan Laut dan Prajurit Yonif TNI Angkatan Darat dibawah Komando Daerah Militer (Kodam). Peranan Kodam dalam pengamanan pulau terluar utamanya pada penegakan kedaulatan yang mengarah pada potensi konflik dan permasalahan perbatasan. Secara umum pengamanan kawasan pulau kecil menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sementara TNI AD dalam hal ini Kodam melakukan pengamanan atas ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara (Disjarah TNI AD, 2012).

Dalam rangka pengamanan kawasan pulau kecil terluar, TNI menempatkan pasukannya di pulau-pulau terluar untuk melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan situasi. Pelaksanaan satuan tugas pengamanan oleh Tentara Nasional Indonesia dilakukan berdasar pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/153/2007 tanggal 2 mei 2007 menyebutkan dalam pelaksanaan operasi pengamanan pulau – pulau terluar, komando dan pengendalian berada di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) setempat (Nainggolan et al., 2021). Selanjutnya, operasi pengamanan wilayah perbatasan (Opspamwiltas) yang meliputi kawasan pulau kecil terluar dilakukan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1481/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan sebagaimana dengan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1481.a/XII/2019 tanggal 22 November 2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan, yang menyebutkan bahwa operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar strategis diselenggarakan sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam bentuk operasi non tempur yang bersifat aktif sepanjang tahun di wilayah operasi yang ditentukan dengan gelar kekuatan TNI yang dilaksanakan secara mandiri maupun terpadu dengan menempatkan Satuan Tugas (Satgas) maupun Unsur Tugas di pulau-pulau kecil terluar strategis secara statis maupun di titik kuat yang berada di sekitar wilayah pulau-pulau kecil terluar strategis.



## 2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Resort Militer 151/Binaiya dalam Pengamanan Pulau Kecil Terluar

Komando Resor Militer 151/Binaiya merupakan komando teritorial di bawah Komando Daerah Militer XVI/Pattimura yang bermarkas di Ambon Maluku. Secara teritorial, Korem 151/Binaiya membawahi tujuh komando distrik militer diantaranya Kodim 1502/Masohi, Kodim 1503/Tual, Kodim 1504/Ambon, Kodim 1506/Namlea, Kodim 1507/Saumlaki, Kodim 1511/Pulau Moa, Kodim 1513/Seram Bagian Barat (Korem 151 Binaiya, 2024). Komando resor militer memiliki tugas utama yaitu 1). Pelaksanaan pertempuran yaitu melakukan kegiatan pertempuran darat di wilayah provinsi maluku dalam rangka mengamankan kepentingan nasional; 2). Melakukan pembinaan kesatuan yang terdiri atas penyiapan kekuatan dan pengembangan kekuatan; dan 3). Melaksanakan pembinaan teritorial yaitu melakukan perencanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi non militer untuk mendukung pertahanan nasional di kawasan provinsi maluku. Selain tugas utama, komando resor militer melaksanakan fungsi organik pembinaan seperti pelatihan personil dan fungsi organik kemiliteran yang meliputi intelijen, operasi, logistik dan pengawasan.

Dikarenakan wilayah tugas dari Korem 151/Binaiya merupakan kawasan pulau kecil dan perbatasan, maka Korem 151/Binaiya juga memiliki tugas dalam pengamanan kawasan pulau kecil terluar. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1150/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar Strategis di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar strategis diselenggarakan sebagai OMSP dalam bentuk operasi non tempur yang bersifat aktif sepanjang tahun di wilayah operasi yang ditentukan dengan gelar kekuatan TNI yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Gelar kekuatan statis. Gelar kekuatan dalam operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar strategis dapat dilaksanakan secara mandiri maupun terpadu dengan menempatkan Satgas maupun Unsur Tugas di pulau-pulau kecil terluar strategis secara statis guna menduduki dan menguasai pulau yang menjadi wilayah tanggung jawabnya dalam rangka menanggulangi ancaman nyata maupun mengantisipasi ancaman potensial di pulau-pulau tersebut.
- b. Gelar kekuatan di titik kuat. Gelar kekuatan dalam operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar strategis dapat dilaksanakan secara mandiri maupun terpadu dengan menempatkan SATGAS maupun Unsur Tugas di titik kuat yang berada di sekitar wilayah pulau-pulau kecil terluar strategis yang memungkinkan penguasaan dan mobilitas SATGAS maupun Unsur Tugas untuk dapat mengamankan dan merespons ancaman dengan cepat tanpa harus menduduki pulau-pulau tersebut.

Wilayah kerja Korem 151/Binaiya sebagian berada pada kawasan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Adapun penempatan prajurit pada pulau terluar dalam rangka pengamanan perbatasan diantaranya terletak di Pulau Lirang, Pulau Wetar, Pulau Letti, Pulau Metimarang, Pulau Masella, Pulau Selaru, Pulau Larat, Pulau Batu Goyang dan Pulau Kisar yang digambarkan pada persebaran berikut:





Sumber: Komando Resor Militer 151/Binaiya

Dalam rangka pengamanan pulau terluar Komando Resor Militer ditunjuk sebagai Komando Pelaksana Operasi Militer pengamanan wilayah pulau kecil terluar di kawasan Provinsi Maluku. Sebagai Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar di wilayah tanggung jawabnya, Korem 151/Binaiya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan
  - 1) Menerima perintah persiapan operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar strategis dari Panglima Komando Tugas Gabungan (Pangkogasgab).
  - 2) Merencanakan pelaksanaan operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar strategis.
  - 3) Mengoordinasikan kebutuhan personel dan alutsista kepada Komando Tugas Gabungan (Kogasgab), satuan dan instansi terkait.
- b. Tahap Persiapan
  - 1) Mengeluarkan perintah persiapan kepada Satgas yang akan melaksanakan operasi.
  - 2) Memastikan kembali kesiapan Satgas yang dilibatkan dalam penyelenggaraan operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar strategis.
  - 3) Melaporkan kesiapan Satgas kepada Pangkogasgab.
  - 4) Meyakinkan pergeseran Satgas ke daerah operasi berjalan sesuai rencana.
- c. Tahap Pelaksanaan
  - 1) Melaksanakan operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar strategis di wilayah tanggung jawabnya.
  - 2) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Satgas operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar strategis di wilayah tanggung jawabnya.
  - 3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan operasi kepada Pangkogasgab.



d. Tahap Pengakhiran

- 1) Melaksanakan konsolidasi.
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar strategis kepada Pangkogasgab.
- 3) Melaksanakan evaluasi operasi pada tataran operasional dan melaporkan kepada Pangkogasgab.

Saat ini Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) wilayah timur Indonesia dilaksanakan oleh Satgas Pamputer Maluku XXVI TA 2023/2024 yang memiliki masa tugas selama satu tahun. Satgas Pamputer XXVI terdiri atas 147 personil yang akan disebarkan ke seluruh pos yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni diantaranya Pos Wetar, Pos Kaisar, Pos Leti, Pos Masela, Pos Lirang, Pos Larat, Pos Selaru, Pos Penambulai dan Pos Batu Goyang (Tehupuring, 2023).

Jika ditinjau dari sisi strategi pertahanan, menurut Yarger, (2006) strategi pertahanan dirumuskan dalam tiga substansi yaitu proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Pelaksanaan pengamanan pulau terluar yang dilakukan oleh Korem 151/Binaiya selaku Kolakops secara substansi sudah berjalan dengan optimal. Jika ditinjau dari sisi proporsionalitas komposisi personil sudah cukup mewakili komponen satuan yang dibutuhkan dalam pengamanan kawasan. Penentuan pasukan juga dilakukan dengan pemilihan berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki dari masing-masing satuan. Alokasi sumber daya telah disesuaikan dengan skala ancaman yang ada serta dukungan logistik dan persenjataan juga diberikan dengan memadai. Meskipun masih terdapat berbagai kendala khususnya pada kesiapan personil pada kondisi yang tidak terduga, karena kondisi geografis pulau yang jauh dari pemukiman dan akses ke pusat komando. Pada dimensi keseimbangan membahas tentang keseimbangan aspek yang diperlukan dalam mewujudkan sistem keamanan misalnya kekuatan militer, intelijen, diplomasi dan kekuatan ekonomi. Pada konteks ini, Satgas Pamputer secara spesifik melakukan kegiatan operasi Operasi Militer Selain Perang untuk pengamanan kawasan perbatasan, sehingga fokus operasinya merupakan operasi pengamanan dan pengendalian kawasan. Aspek yang paling menonjol dari satuan tugas ini adalah aspek militer dan penyediaan informasi. Dari sisi sistem pertahanan, satuan tugas ini berkontribusi pada pemberian informasi faktual tentang kondisi-kondisi yang terjadi di kawasan pulau kecil dan terluar. Satuan tugas juga memerankan fungsi-fungsi intelijen misalnya sebagai penyedia informasi, penanggulangan konflik dan kontra terorisme yang dilakukan di kawasan perbatasan. Dimensi yang ketiga adalah dimensi koordinasi yang menekankan adanya koordinasi antar komponen yang terlibat dalam pertahanan negara hal ini meliputi koordinasi internal TNI AD dan eksternal TNI AD termasuk, POLRI, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), TNI AL dan TNI AU serta pemerintah daerah. Koordinasi di internal TNI AD berjalan dengan optimal tercermin dari adanya penjenjangan perintah antar komando teritorial serta hirarki pelaporan yang jelas dan terstruktur. Pada konteks koordinasi antar stakeholder, TNI AD juga melakukan berbagai upaya untuk melakukan penugasan gabungan dalam pengamanan kawasan misalnya dengan TNI Angkatan Laut.



Peran Korem 151/Binaiya dalam operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar diharapkan dapat selaras dengan kebijakan dan strategi TNI AD. Pengamanan dan pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil terluar idealnya dilaksanakan secara kolaborasi antara TNI bersama unsur lainnya seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan unsur lainnya yang bergerak secara terpadu. Tujuan akhir dari operasi ini yaitu untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, menciptakan stabilitas kawasan serta mendukung pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan bangsa Indonesia. Korem 151/Binaiya sebagai Satuan Komando Wilayah dapat mengoptimalkan penggunaan kekuatan militernya untuk melaksanakan operasi teritorial secara efektif dan efisien. Sebagian besar kawasan pulau-pulau di wilayah tugas Korem 151/Binaiya merupakan daerah perbatasan, terpencil dan rawan konflik, sehingga tidak cukup hanya dengan memberdayakan Satgas Pamputer, tetapi juga memerlukan peran teritorial serta gelar kekuatan yang sesuai dengan bentuk dan kompleksitas ancaman dan tipologi wilayah.

Pelaksanaan operasi Pamputer perlu didukung dengan komponen dan gelar pasukan yang proporsional dan disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang ada. Para personel yang dikirimkan perlu memperoleh pembekalan dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik sesuai prosedur tetap dalam penugasan. Personel yang dikirimkan juga perlu didukung dengan kualifikasi yang memadai yang telah diseleksi dan memperoleh pelatihan yang memadai. Selanjutnya, gelar pos pengamanan pulau-pulau terluar juga memiliki nilai taktis, sehingga perlu didukung dengan sarana dan prasarana untuk komunikasi, pengawasan dan pengamanan yang memadai. Satuan Tugas Pamputer juga perlu mendapatkan dukungan jejaring dari berbagai stakeholder termasuk dari matra lain seperti Angkatan Laut, Instansi Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Kehadiran satuan tugas Pamputer di kawasan pulau kecil dan terluar tidak hanya bersifat formalitas pelaksanaan tugas namun juga dapat berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah serta mampu menjadi garda terdepan dalam pertahanan nasional.

### **3. Tantangan Pelaksanaan Operasi Pengamanan Pulau Kecil Terluar**

Pertahanan dan keamanan merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar (Nugraha, 2023). Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap kejahatan dan pelanggaran kedaulatan (Arif & Kurniawan, 2018). Kejahatan lintas negara merupakan tantangan besar yang seringkali dihadapi pada negara kepulauan. Kejahatan lintas negara dapat terjadi dengan berbagai bentuk dan merupakan ancaman yang nyata bagi kedaulatan (Lay & Astrina, 2020). Kolaborasi dan integrasi operasi antar institusi merupakan strategi yang ideal sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam pengamanan kawasan pulau terluar. Tantangan lainnya muncul dari aspek yang lebih makro yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga atau mengembangkan aktivitas perekonomian dan pembangunan pada pulau terluar. Akibatnya kawasan pulau terluar menjadi kawasan yang rentan terhadap aneksasi atau intervensi dari negara lain (Kusuma & Kurnia, 2022). Tantangan lainnya yang muncul dalam pelaksanaan operasi adalah adanya konflik internal di masyarakat mulai dari permasalahan pertanahan, konflik horizontal antar warga dan konflik yang disebabkan oleh munculnya aksi teror.



Menurut Harruma, (2022) terdapat berbagai isu yang menjadi pokok persoalan dalam pengembangan dan pengamanan kawasan pulau terluar dan perbatasan yaitu isu batas teritorial, isu keamanan, isu lingkungan, isu kemiskinan, isu koordinasi, isu kependudukan dan isu patriotisme. Selain itu, masalah-masalah yang menjadi tantangan dalam operasi di kawasan pulau terluar yaitu rendahnya infrastruktur pelayanan publik, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses komunikasi dan rendahnya aktivitas perekonomian. Tantangan-tantangan tersebut, secara tidak langsung berpengaruh pada efektifitas pengamanan dan pertahanan pulau-pulau kecil terluar. Sebagai kawasan yang strategis, pulau terluar perlu menjadi prioritas dalam pengamanan karena dapat menjadi pintu masuk berbagai kejahatan internasional yang mengancam kedaulatan. Pos-pos lintas batas perlu dioptimalkan dengan penambahan kapasitas baik dari sisi infrastruktur, teknologi, dan utamanya integrasi sistem keamanan yang memadai.

Jika ditinjau lebih teknis khususnya pada Korem 151/Binaiya, terdapat empat permasalahan yang menjadi tantangan dalam mewujudkan efektifitas pelaksanaan operasi pengamanan pulau kecil terluar. Keempat permasalahan tersebut diantaranya 1) Sistem seleksi dan standar kompetensi personil yang belum memadai. Pada proses rekrutmen personil dalam pelaksanaan operasi, Korem 151/Binaiya belum memiliki parameter yang jelas dan tegas tentang kemampuan dan spesifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan misi operasi Satgas Pamputer. 2) Belum adanya latihan khusus pratugas bagi personel yang ditugaskan sebagai anggota Pamputer. Akibatnya saat di lapangan (di daerah penugasan) kinerja personel kurang optimal dan relatif membutuhkan waktu untuk penyesuaian di daerah penugasan. Mengingat daerah pulau kecil dan terluar merupakan kawasan yang serba terbatas, diperlukan kesiapan yang matang dan kapasitas personel yang memadai untuk melaksanakan tugas. 3) Fasilitas Pos pengamanan yang sangat terbatas. Keterbatasan fasilitas pada pos pengamanan mengakibatkan personel yang bertugas kesulitan untuk coverage area pengawasan sekaligus memantau adanya gangguan keamanan di pulau-pulau yang menjadi konsentrasi Pamputer. 4). Sistem penjagaan yang kurang terstruktur dan terkoordinasi antar satuan. Kurang terkoordinasinya antar satuan di lapangan mengakibatkan tugas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, misalnya diindikasikan adanya kebingungan dalam pembagian tugas sehingga personel sering pindah-pindah pos pengamanan. 5) Pelaksanaan pengamanan yang masih belum optimal. Indikasinya adalah masih adanya konflik yang terjadi misalnya konflik antara Desa Eliasa dan Desa Fursuy, Kec.Selaru, Kab. Kep. Tanimbar yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2023 yang dipengaruhi oleh sengketa petuanan laut, yaitu warga Desa Fursuy melakukan pencarian hasil laut yang sudah melewati tanjung Hatuksinan. Konflik tersebut memunculkan adanya indikasi penolakan terhadap kehadiran Satgas Pamputer di Desa Eliasa karena dianggap memihak kepada warga Desa Eliasa.

#### **4. Optimalisasi Peran Komando Resort Militer 151/Binaiya dalam Pengamanan Pulau Kecil Terluar**

Optimalisasi peran komando Resort Militer 151/Binaiya dalam Pengamanan Pulau Kecil Terluar dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu eksternal dan internal. Pendekatan eksternal mengacu pada penyelesaian permasalahan makro antar instansi/organisasi sedangkan pendekatan internal dilakukan untuk perbaikan sistem di internal instansi. Menurut (Nainggolan et al., 2021) optimalisasi peran satgas dapat dicapai apabila kendala dari sisi



komando dan pengendalian, sinergi matra TNI dan kementerian lembaga dapat diatasi dengan optimal. Melalui perbaikan dari sisi komando dan sinergi antar matra diharapkan operasi dapat berjalan dengan lebih optimal. Terdapat tiga strategi dalam optimalisasi peran satgas pengamanan pulau terluar yaitu 1). Dilaksanakannya komando gabungan antar matra untuk memperkuat basis pertahanan dan integrasi sistem pertahanan di kawasan pulau terluar; 2). Terwujudnya sinergi antara TNI dengan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan pemberdayaan serta memberikan ruang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengamanan kawasan; 3). Meningkatkan kapasitas SDM personel yang akan melaksanakan penugasan yang tidak hanya dibekali dengan kemampuan militer namun juga kemampuan untuk melakukan operasi militer selain perang khususnya dalam memberdayakan masyarakat (Nainggolan et al., 2021).

Pendekatan eksternal dalam meningkatkan optimalisasi peran Komando Resor Militer 151/Binaiya dalam pengamanan pulau kecil terluar dilakukan pada ruang lingkup kebijakan dan strategi. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

- 1) Mengintegrasikan sistem pertahanan antar matra khususnya dalam pengamanan kawasan pulau kecil terluar. Integrasi sistem baik dari sisi komando gabungan maupun infrastruktur pertahanan akan mampu meningkatkan kinerja satuan tugas dalam melakukan operasi. Kemampuan antar matra akan saling melengkapi kekurangan satuan, terlebih posisi daerah pulau terluar lebih banyak berada pada kawasan laut. Integrasi sistem antar matra juga dapat memudahkan komunikasi dan transfer pengetahuan, hal ini tentunya menjadi indikasi positif bagi TNI untuk dapat mewujudkan satuan pelaksana tugas yang terpadu;
- 2) Menyusun strategi kolaboratif. Konsep pertahanan pulau kecil terluar tidak hanya menggunakan pendekatan militer namun juga menggunakan pendekatan non militer. Strategi kolaborasi antar stakeholder misalnya dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga dan masyarakat dapat mendorong terwujudnya pertahanan dari sisi non militer. Hal ini penting untuk saling berbagi sumber daya dan kewenangan serta menjaga agar operasi dapat berjalan dengan berkelanjutan.
- 3) Menyusun kerangka program pemberdayaan masyarakat di kawasan pulau kecil terluar. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk membuka keterlibatan publik. Keterlibatan aktif dari masyarakat secara tidak langsung akan berdampak pada tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk saling memiliki. Kolaborasi TNI-Rakyat merupakan garda utama dalam pertahanan, sehingga dengan adanya keterlibatan publik pelaksanaan operasi di pulau kecil terluar akan berjalan dengan optimal.

Pendekatan internal dilaksanakan dengan berfokus pada perbaikan sistem dalam organisasi. Perbaikan dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian dan revitalisasi tata kelola penugasan, pembenahan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya personal dan sistem operasi yang memadai. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk optimalisasi satuan tugas pengamanan pulau kecil terluar diantaranya:

1. Menetapkan standar dan prosedur rekrutmen satgas pengamanan pulau kecil terluar. Termasuk menetapkan standar kompetensi personel dan kemampuan khusus yang dibutuhkan untuk bertahan dan beradaptasi pada kondisi pulau kecil terluar. Kejelasan dalam rekrutmen dapat memberikan *input* pasukan yang kompeten, proporsional dari sisi kemampuan serta selaras dengan kebutuhan operasi. Tentunya, dengan personel yang kompeten pelaksanaan operasi di lapangan akan lebih efektif dan berdampak pada pencapaian tujuan;
2. Melaksanakan pembekalan praturgas serta memberikan pelatihan bagi personel yang ditugaskan. Pelatihan merupakan salah satu strategi untuk mengisi kemampuan personel agar sesuai dengan kebutuhan operasi.



3. Melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur pos keamanan di lapangan. Perbaikan pos keamanan di lapangan serta keberadaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan operasi. Perbaikan infrastruktur meliputi sarana dan prasarana dasar pada pos keamanan serta infrastruktur komunikasi dasar bagi personel untuk menyalurkan informasi. Perbaikan infrastruktur dasar dapat dilakukan bersama dengan masyarakat atau dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility*. Pengadaan infrastruktur dasar pada pos keamanan yang ditunjang dengan kelengkapan persenjataan dan sarana komunikasi akan sangat membantu mengoptimalkan pelaksanaan operasi.

Menyusun kegiatan operasi yang detail, terstruktur dan berdampak. Program kegiatan operasi militer tidak hanya dilakukan pada aspek penugasan militeristik misalnya patroli rutin, tetapi juga perlu diperkaya dengan program-program yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, terlebih jika program tersebut dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan warga setempat. Keberadaan program-program non militer justru akan membantu para personel untuk dapat diterima di masyarakat dan dalam jangka panjang dapat menjadi faktor dalam keberlanjutan program pertahanan yang dilaksanakan.

## KESIMPULAN

Pengamanan pulau kecil terluar memiliki arti penting dalam pertahanan nasional. pulau kecil terluar tidak hanya sebagai pembatas antar negara namun juga berperan sebagai garda terdepan sistem pertahanan negara, sehingga penguatan pertahanan di kawasan perlu untuk dilakukan. Komando Resor Militer 151/Binaiya merupakan salah satu komando teritorial yang memegang komando pengamanan kawasan pulau kecil terluar di Indonesia timur. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Komando Resor Militer 151/Binaiya memegang komando Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) dan telah memenuhi kaidah pertahanan negara yaitu proporsional, seimbang dan terkoordinir. Pelaksanaan tugas pengamanan kawasan pulau terluar mengalami berbagai kendala dan tantangan diantaranya. Secara makro adanya ancaman dari kejahatan internasional, pada sisi kebijakan belum adanya strategi kolaborasi dan integrasi sistem pertahanan antar matra yang memadai, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat di kawasan pulau terluar pada keamanan dan pertahanan nasional. Selain itu dari sisi tata kelola, permasalahan yang terjadi diantaranya belum adanya sistem seleksi dan standar kompetensi yang memadai, belum adanya latihan khusus pra-penugasan, fasilitas pos pengamanan yang belum memadai, sistem penjagaan yang kurang terstruktur dan terkoordinasi serta kegiatan pengamanan yang belum optimal.

Strategi untuk melakukan optimalisasi peran Komando Resor Militer 151/Binaiya dalam pengamanan pulau kecil terluar dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan eksternal dan internal. Pendekatan eksternal lebih berfokus pada aspek kebijakan dan strategi yang meliputi pengintegrasian sistem pertahanan, penyusunan strategi kolaboratif antar stakeholder, penyusunan kerangka program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan internal dilakukan dengan penyesuaian dan revitalisasi tata kelola penugasan, pembenahan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya personil dan sistem operasi yang memadai. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya menetapkan standar dan prosedur rekrutmen, melaksanakan pembekalan pratugas, dan menyusun program kegiatan pengamanan yang ideal serta berkontribusi pada masyarakat setempat.



## REFERENSI

- Agoes., E. R. (2011). Indonesia: Problem Encountered in Some Unresolved Boundaries and the Outermost Island Issues. *Indonesian Journal of International Law*, 9(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol9.1.333>
- Antara. (2021). All eyes on new TNI commander Andika Perkasa. Antara Indonesia News Agency.
- Arif, M., & Kurniawan, Y. (2018). Strategic Culture and Indonesian Maritime Security. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 5.
- Avanesyan, M. (2023). The Role of Nuclear and Renewable Energy in Ensuring the Energy Security of Türkiye in the Face of New Challenges of Geo-economic Development. *Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University*, 2(2(5)), 34–55. <https://doi.org/10.46991/jops/2023.2.5.034>
- B. Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative Data Analysis*.
- Case, P. A., Of, S., & Fields, K. (2022). Indonesia Sea Defense Strategy in Overcoming Maritime Threats. *International Journal of Education and Social Science Research*, 5(5), 424–465.
- Dabova, E. L. (2013). Non-traditional security threats in the border areas: Terrorism, piracy, environmental degradation in southeast Asian maritime domain. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives*, 40(4W3), 51–56. <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-4-W3-51-2013>
- Darmono, B. (2010). Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketaanan Nasional*, XV(1).
- Devence Review Asia. (2023). Indonesia defense expenditure to reach \$9.7 billion by 2028. *Devence Review Asia*.
- Disjarah TNI AD. (2012). Peranan TNI AD dalam Pengamanan Perbatasan NKRI. Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat.
- Grahadyarini, B. L. (2021). Pelanggaran Batas Wilayah Masih Terus Berlangsung. *Kompas.Id*.
- Greenless, D. (2022). Indonesia's Biggest Military Challenge? The Budget. *The National Interest*.
- Harruma, I. (2022). Masalah-Masalah di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Upaya Mengatasinya. *Kompas.Com*. <https://doi.org/https://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/00050061/masalah-masalah-di-wilayah-perbatasan-indonesia-dan-upaya-mengatasinya?page=all>
- Korem 151 Binaiya. (2024). Profil Komando Resor Militer 151/Binaiya. *Korem 151 Binaiya*. <https://korem151.tni-ad.mil.id/about-us/>
- Kusuma, W., & Kurnia, A. C. (2022). Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 447–458. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.447-458>
- Lay, C., & Astrina, A. (2020). The Limits of the Multiple Institutionalization of Border Control: A Case Study of Immigration, Customs, and the Indonesian Maritime Security Agency in Batam, Indonesia. *Pacific Affair*, 93.
- Lin, G. E. (2018). Non-Traditional Security Dilemmas: Can Military Operations other than War Intensify Security Competition in Asia? *Asian Security*, 14(3). <https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1414044>
- Manuputty, A., Patittingi, F., & Ashri, M. (2015). The Existence Of Leading Islands Securing and The Border Areas Unitary State Of Indonesia (An Analysis In Law Perspective). *International Journal of Scientific and Technology Research*, 4(12), 89–92.
- Marjavaara, R. (2007). *Island Studies Journal* ., *Island Studies Journal*, 2(1), 27–46.
- Maulana, L. (2024). Ancaman Keamanan Maritim Mengintai, RI Perlu Waspada. *Katadata.Co.Id*.
- Moleong, L. . (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.



- Naibaho, D. Y. S. (2022). Marine Defense Strategy With Military Base Development on the Outside Island As a Leading Defense and Defense Mobility. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 8(1), 74. <https://doi.org/10.33172/spl.v8i1.1042>
- Nainggolan, A. S. P., Setyoko, B., & Marihot. (2021). Optimalisasi Peran Satgas TNI Guna Meningkatkan Pemberdayaan Pulau Terluar Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 2(1), 126–140. <https://doi.org/10.46306/jabb.v2i1.98>
- Negeri, K. L. (2018). Sekilas tentang Indonesia. Kementerian Luar Negeri.
- Ningsih, T. G., Rudiawan, B., & Sianturi, D. (2023). Community Empowerment in Outermost Small Islands in Maintaining Territorial Integrity and Realizing Indonesian Maritime Defense. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 732–737. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.320>
- Nugraha, A. (2023). Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan, Keamanan dan Kedaulatan Maritim. *Simbur Cahaya*, XXX(2), 272–300. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i2.2858>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. In <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57400/keppres-no-6-tahun-2017>.
- Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, (2004).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA, (2008).
- Sasmini. (2009). Pengelolaan dan Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia. Universitas Sebelas Maret. <https://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaan-dan-pengamanan-pulau-pulau-terluar-indonesia/>
- Stratsea. (2024). Security vs. Militarization: The Debate Over Kodam Expansion. Stratsea.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Tehupuring, C. (2023). 147 Personil Satgas Pam Puter Maluku Diberangkatkan. RRI. <https://www.rri.co.id/daerah/286638/147-personil-satgas-pam-puter-maluku-diberangkatkan>
- Yarger, H. (2006). Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy.

